

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Peneliti mendiskripsikan teori-teori yang relevan yang dapat digunakan dalam membahas obyek penelitian. Dalam bukunya Sugiyono menyampaikan bahwa dalam melakukan penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam hal ini Borg and Gall (1988) menyatakan bahwa:

*"Qualitative research is much more difficult to do well than quantitative research because the data collected are usually subjective and the main measurement tool for collecting data is the investigator himself".*

Melakukan penelitian kualitatif jauh lebih sulit dilakukan dengan baik dari pada penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan biasanya bersifat subjektif dan alat ukur utama untuk mengumpulkan data adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas. Instrumen penelitian dilakukan dengan melaksanakan penelitian baik wawasan teoritis maupun wawasan yang berkaitan dengan konteks sosial yang diteliti berupa nilai, budaya, keyakinan, prinsip, hukum, dan adat istiadat yang terjadi pada konteks sosial (Sugiyono, 2013).

Dalam melaksanakan penelitian yang mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan. Selain teori peneliti juga menggunakan tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini guna mengulas tentang literatur-literatur yang membahas tentang modernisasi alutsista Kendaraan Tempur, peluang dan tantangan yang dihadapi di dalam efektifitas dan upaya peningkatan strategi modernisasi Ranpur Tank Amfibi Korps Marinir di Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai, sehingga didapat kesimpulan yang diinginkan oleh peneliti.

### 2.1.1 Teori Strategi

Penelitian ini mengkaji dan membahas strategi. Pada penelitian ini dimulai dengan membahas tentang pengertian dan konsep strategi yang dikeluarkan oleh beberapa ahli. Penjelasan mengenai konsep-konsep strategi perlu dilaksanakan untuk mendiskripsikan ciri-ciri strategi dalam mendukung pelaksanaan kajian ini. Proses dalam strategi merupakan untuk mencapai suatu tujuan yang berorientasi pada masa yang akan datang kedepan, dan bersifat kenyal yang dapat berubah-ubah setiap waktu sesuai dengan perkembangan ancaman yang kemungkinan dapat terjadi. Strategi adalah segalanya untuk meraih kemenangan. Dalam sebuah strategi tujuan utama yang dimiliki adalah untuk membimbing sebuah keputusan dalam rangka membentuk dan mempertahankan keunggulan guna mencapai pada penyelesaiannya sehing berhasil dan sukses (Nurhadi, 2015).

Arthur F. Lykke Jr.(Lykke, 1989) bahwa teori strategi yang terdiri dari tiga unsur yaitu *means*, *ways*, dan *end*. *Means* adalah sarana untuk mencapai tujuan. *Ways* adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. *Ends* adalah tujuan yang ingin di capai. Beginilah cara kerjanya, tetapi karena ini adalah seni, bukan sains, jadilah fleksibel. Langkah pertama identifikasi tujuan yang diinginkan dalam proses ini diperuntukkan untuk mendukung baik analisis misi dan perencanaan berbasis efek. Langkah dua mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan dan pilih salah satu yang menurut bukti paling mungkin berhasil. Kemudian pilih tindakan yang paling mendasar atau esensial. Cara adalah tindakan kritis yang akan mencapai keadaan akhir. Cara adalah kata kerja, kemampuan kritis adalah kata kerja yang sama. Langkah tiga daftar cara yang diperlukan untuk mengaktifkan dan menjalankan cara atau kemampuan kritis. Langkah empat pilih entitas (kata benda) dari daftar sarana yang memiliki cara atau kemampuan kritis untuk mencapai tujuan. Pilihan ini adalah pusat gravitasi. Pada langkah lima, akan memilih item kritis dari item yang tersisa pada daftar rata-rata. pada langkah enam dengan mengidentifikasi persyaratan kritis mana yang rentan.(Eikmeier, 2007).

Sun Tzu (l. C. 500 SM) adalah seorang ahli strategi militer China dan jenderal yang paling dikenal sebagai penulis dengan karyanya *The art of war*, sebuah risalah tentang strategi militer juga dikenal sebagai (*The Thirteen Chapters*). Slogan Sun Tzu:

- a. Dalam pertempuran jika anda mengenal pihak lain (musuh) dan dapat mengenal dirinya sendiri, maka tidak akan dikalahkan didalam menghadapi seratus pertempuran.
- b. Dalam pertempuran jika anda tidak mengenal pihak lain (musuh) akan tetapi mengenal dirinya sendiri, maka kemungkinan memiliki suatu peluang yang seimbang untuk menang atau kalah.
- c. Dalam pertempuran, jika anda tidak mengenal pihak lain (musuh) dan dirinya sendiri, cenderung akan mengalami kekalahan dalam setiap pertempuran.

sehingga peperangan yang dilancarkan dalam banyak pertempuran dan dapat memenangkan kemenangan bukanlah suatu faktor tercapainya sebuah strategi yang paling hebat. Kemampuan untuk bisa mengalahkan musuh tanpa melakukan perang sama sekali adalah cerminan strategi yang paling hebat dan handal dan menjadi faktor utama didalam pertempuran. Sun Tzu dalam teorinya lebih menekankan kesiapan militer dalam menjaga perdamaian dan tatanan sosial. Sun-Tzu menjadi sebuah perdebatan, apakah seorang individu bernama Sun-Tzu ada sama sekali ataukah hanya karya tulisan orang lain, para sarjana dan sejarawan memperdebatkan keberadaannya. Lao-Tzu (l. C. 500 SM), filsuf Tao yang dianggap sezaman dengannya meyakinkan keberadaan *The Art of War*, bagaimanapun secara jelas membuktikan bahwa seseorang ada untuk menghasilkan karya tersebut, dan tradisi berpendapat bahwa karya tersebut ditulis oleh seorang Sun-Tzu (Halkis, 2020).

Carl Von Clausewitz (1780-1831) adalah seorang perwira dari Angkatan Darat Prusia yang sekarang kita kenal negara Jerman menyatakan bahwa strategi militer adalah tujuan yang ditentukan dari hasil politik, dia juga memiliki teori tentang strategi "*Strategy is the use of the*

*engagement for the purpose of the war*". Menurutnya, bahwa masa kini tidak memberikan ideal yang dapat digunakan untuk mengukur perang di masa lalu, Clausewitz juga bersikeras bahwa perang Napoleon tidak dapat dilakukan dalam menetapkan standar untuk masa depan. Apa artinya ini bagi teori?. Bagi Clausewitz, jawabannya sudah jelas, teori aktivitas apa pun bahkan jika itu ditujukan untuk kinerja yang efektif dari pada pemahaman yang komprehensif, harus menemukan elemen esensial yang tak lekang oleh waktu dari aktivitas dan membedakannya dari fitur sementara yaitu kekerasan dalam pertempuran (Clausewitz, 1984).

Dalam sebuah peperangan ada dua tindakan yang bisa dikatakan hampir sama namun secara hakiki berbeda. Pertama adalah taktik yaitu pelaksanaan pertempuran dimana dalam setiap pertempuran yang dilaksanakan selalu hampir tidak sama dan menggunakan cara yang berbeda, dalam pertempuran untuk memperoleh kemenangan. Sedangkan yang kedua adalah strategi yaitu kombinasi antara atau gabungan dari setiap pertempuran melawan lawan atau musuh yang telah dilakukan sehingga perang yang dilakukan mencapai kemenangan (Sumakul, 2017).

### **2.1.2 Teori Pertahanan**

Ilmu pertahanan tidak hanya membahas ilmu dan seni perang saja yang akan diimplementasikan pada saat perang baik itu *deployment*, maupun penggunaan strategi dan taktik yang digunakan saat perang. Ilmu pertahanan lebih luas dari pada seni dan ilmu perang, ilmu militer dan strategi. Dalam buku Makmur Supriyatno "Tentang Ilmu Pertahanan" ia mendefinisi ilmu pertahanan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang dan pada saat sesudah perang guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah. Kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014).

Pertahanan dapat dikatakan sebagai bentuk atau upaya yang merupakan segala usaha untuk menangkal, menindak dan memulihkan segala ancaman dari luar maupun dari dalam. Menurut Andi Widjajanto dalam “Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal” mendefinisikan pertahanan negara sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Bakrie, 2007:45). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara (pasal 1 ayat 1) yang menyatakan bahwa, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Juwono Sudarsono dalam (Bakrie, 2007:47). Menyatakan bahwa, pertahanann pada dasarnya memiliki ruang cakupan yang luas. Disatu sisi, pertahanan dalam arti sempit ialah menyangkut kekuatan militer. Disisi lain, pertahanan secara luas menyangkut berbagai macam aspek kehidupan, termasuk ekonomi diantaranya. Profesor ilmu politik di *Ohio State University*, R. William Liddle menyatakan bahwa, ada dua unsur fisik yang mendasar dalam membangun kekuatan bangsa, dua faktor tersebut adalah: ekonomi dan militer disamping dari *critical mass*, yang merupakan fungsi kritis masyarakat Indonesia dalam tantangan global (Bakrie, 2007:50). Jika melihat pernyataan diatas maka pertahanan dapat diartikan juga sebagai tolak ukur kekuatan bangsa dalam bernegara.

(Holcner & Smiljanic, 2018) *Stability of Defence Expenditures and the Concept of Sustainability in Defence Sector*. Pertahanan atau *defence* dapat dikatakan merupakan instrumen utama sebuah negara untuk menciptakan keamanan nasional, meskipun istilah keamanan nasional telah berkembang sejak akhir tahun 1940 yang mempertimbangkan wilayah, kedaulatan serta individu warga negara. Kewajiban dan kewenangan negara untuk menciptakan keamanan nasional menjadikan

pertahanan sebagai salah satu elemen penting sektor publik. Pendanaan untuk keamanan nasional memiliki status khusus sebab memberikan prasyarat untuk stabilitas nasional, kemajuan ekonomi dan sosial, politik, kesehatan, dan sistem demokrasi (Mardhani et al., 2020).

Dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan (Kemenhan, 2015). Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Marsetio menyampaikan bahwa strategi pertahanan negara Indonesia TNI AL merupakan sebagai bagian integral dari tubuh TNI yang saling terkordinasi secara garis komando. Pertahanan sebagai komponen utama negara dimana Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Menjalankan tugas guna menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara melalui pelaksanaan (OMP) Operasi Militer untuk Perang dan (OMSP) Operasi Militer Selain Perang (Marsetio, 2013).

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan memiliki laut yang lebih luas dari pada daratan maka sistem pertahanan kita haruslah mengedepankan laut sebagai sarana pertahanan negara. Angkatan Laut sebagai salah satu unsur yang dimiliki wajib untuk melaksanakan pertahanan di laut. Pada pelaksanaannya Angkatan Laut memiliki fungsi dalam melaksanakan pertahanan dilaut melalui operasi yang dilakukan di laut menggunakan unsur KRI maupun unsur-unsur lainnya demi menjaga kedaulatan NKRI. Menurut Alfred Ken Booth, 2005 yang dalam buku, "*Navies and Foreign Policy*" menyebutkan bahwa: tiga fungsi Angkatan Laut sebagai peran militer (*military*), peran polisionil (*constabulary*), dan peran diplomasi (*diplomacy*) Trinitas Angkatan Laut. Peran dan tugas Angkatan Laut dimasa datang, menurut Ken Booth adalah sebagai berikut:

- a. *War at Sea*, melakukan perang laut;
- b. *Deterrence at sea*, untuk menangkal ancaman;
- c. *Power Projection*, proyeksi kekuatan ke darat;
- d. *Coercive Naval Diplomacy*, lebih menekankan kepada patroli laut atau kehadiran di laut; dan
- e. Kerjasama militer antar Angkatan Laut untuk meningkatkan solidaritas internasional (*Cooperative Naval Diplomacy*).

*Military Harbours and Coastal Facilities, UFC USA*. Dalam buku Induk *Departement of US Navy 2010*, Pangkalan Angkatan Laut (*naval base*) berada di wilayah kerja suatu negara mempunyai peranan yang sangat penting sebagai tempat pengembangan kekuatan laut ke daerah operasi atau "*Deployment force sposition*" dan juga sebagai "*Home Base*" *Refuel Repair and Replenishment*. Dalam gelar operasi kehadiran di laut sehari-hari pangkalan juga memiliki peranan penting berkenaan dengan penerapan efisiensi dan efektifitas operasi menggunakan taktik pangkalan sebagai titik markas pengamanan wilayah negara di laut (Booth, 2005).

Dalam buku *Navies and Foreign Policy* (Ken Booth, 2005) menyampaikan tentang tugas dari Angkatan Laut yang dia sebut sebagai trinitas Angkatan Laut :

*The functions of navies can be conceived as a trinity, the idea of three- in-one. The unity (the one-ness) of the trinity is provided by the idea of the use o f the sea: this is the underlying consideration in the wholebusiness of navies and foreign policy. The character of the trinity is then defined by the three characteristic modes of action by which navies carry out their purposes: namely the military, the diplomatic, and the policing functions. Within each of these roles navies can serve a large variety of subordinate functions* (Booth, 2005).

Dia menyatakan bahwa Angkatan Laut memiliki tiga fungsi, yaitu :

- a. Peran militer, dalam hal ini usaha yang dilakukan untuk menegakkan kedaulatan negara di laut melalui kekuatan unsur dan pangkalan, serta mempersiapkan segala bentuk kekuatan dalam menghadapi peperangan didalam menangkal berbagai bentuk

ancaman militer yang muncul melalui laut dan melaksanakan penjagaan wilayah perbatasan, melindungi segala bentuk ancaman di laut serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan maritim.

b. Peran diplomatik, terbentuk dari kapasitas sebagai representatif Angkatan Laut suatu negara melalui kekuatan militer. Peran ini adalah peran tradisional di seluruh dunia dan dikenal sebagai “unjuk kekuatan Angkatan Laut”. Menjalankan diplomasi untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain untuk keuntungan negara dalam posisi damai maupun pada situasi konflik.

c. Peran polisionil, dilakukan dalam rangka menegakkan hukum di laut, dengan melindungi potensi dan kekayaan laut nasional, menjaga ketertiban di laut, dan mendukung pembangunan nasional dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan keamanan bangsa.



**Gambar 2.1 Fungsi Angkatan Laut**

Sumber: Ken Booth (1977, p.16)

Alfred Thayer Mahan, dalam pandangan militer pada umumnya, keamanan maritim biasanya difokuskan pada masalah keamanan nasional, dalam upaya melindungi keutuhan wilayah negara dari serangan bersenjata atau penggunaan jenis kekuatan lainnya, serta memproyeksikan kepentingan negara ke wilayah-wilayah lain. Menurut Mahan (1889) dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, untuk membangun kekuatan laut atau *sea power* yang kuat, ada beberapa kondisi yang akan sangat berpengaruh terhadap upaya tersebut, yakni: (i) *geographical position* atau letak geografis; (ii) *physical conformation* atau sifat fisik; (iii) *extent of territory* atau luas wilayah; (iv) *number of population* atau jumlah penduduk; (v) *character of the people* atau watak dari penduduk; dan (vi) *character of the government* atau watak dari pemerintah. *Deployment forces position* disini maksudnya adalah pangkalan TNI AL memiliki arti penting dalam menunjang setiap tugas operasi TNI Angkatan Laut. Mahan (1889) juga menyebutkan, suatu negara harus mengembangkan kekuatan lautnya untuk dapat mencapai kejayaan dan untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya.

Tiga syarat yang pertama, pada dasarnya berkaitan dengan geografi negara. Tiga syarat yang lain juga sangat berkaitan erat satu dengan lainnya. Selain itu dalam teorinya Mahan (1889) menggaris bawahi, bahwa unsur kekuatan laut yang disebut *sea power* atau kekuatan laut merupakan unsur yang sangat penting bagi kejayaan yang dimiliki suatu bangsa. Maksud dari *sea power* atau kekuatan laut pada dasarnya identik dengan kekuatan maritim atau *maritime power*. Apabila kekuatan-kekuatan itu diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan negara. Sebaliknya bila kekuatan-kekuatan itu kurang diberdayakan, akan berakibat sangat merugikan negara atau meruntuhkan bangsa tersebut. Mahan menyatakan, bahwa kekuatan laut adalah: "*All that tends to make a people great upon the sea or by sea*".

Corbett (1918), menyatakan bahwa fungsi angkatan laut untuk mencapai *command of the sea*, diantaranya adalah dengan mengamankan

jalur maritim untuk perdagangan, memaksimalkan potensi maritim yang dimiliki untuk digunakan pada operasi militer dalam keadaan ofensif maupun keadaan defensif. Kekuatan armada laut harus siap setiap saat apabila digunakan untuk menyerang wilayah lawan dengan melakukan kerjasama dengan kekuatan inti termasuk kekuatan darat dan kekuatan udara. Konsep strategi maritim yang ditulis pembahasan tentang bagaimana penggunaan kekuatan Angkatan Laut. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa didalam penggunaan kata maritim dalam konsep Angkatan Laut. Dalam konsep strategi dinegara maritim besar sekalipun yang dimaksud adalah kekuatan Angkatan Laut. Asumsinya bahwa kekuatan-kekuatan maritim lain dalam hal ini adalah kekuatan non- militer (sipil), merupakan kekuatan pengganda Angkatan Laut yang akan digunakan manakala negara membutuhkan misalnya dalam masa krisis atau menghadapi kondisi perang yang tentunya akan diatur dengan ketentuan pembahasan dalam peraturan tersendiri (Shell & Edkins, 2005).

Asumsinya adalah bahwa kekuatan-kekuatan maritim lainnya yang dalam hal ini adalah kekuatan non- militer (sipil), merupakan kekuatan pengganda Angkatan Laut yang akan digunakan manakala negara membutuhkan misalnya dalam masa krisis atau perang yang tentunya akan diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri. Dengan pengamatan ini, perlu untuk menyarankan cara berpikir yang lain tentang geografi maritim sebagai kontrol jalur komunikasi laut. Ancaman untuk menutup *choke point* memiliki dua kelemahan, yaitu pertama keuntungan strategis jangka pendek kedua mengganggu saingan pada saat yang sama. Pengamatan Corbett bahwa situasi yang paling umum dalam perang angkatan laut adalah memiliki komunikasi jalur laut; bahwa posisi normal adalah bisa memberikan komunikasi sebaik-baiknya (Forbes, 2013).

Nye (2007), mendefinisikan bahwa dengan menggunakan logika kemampuan kekuatan yang dimiliki yaitu power yang kuat, membuat negara lain akan berpikir ulang untuk melancarkan serangan atau sekedar mengganggu wilayah kedaulatan sebuah negara, meskipun dalam sejarah

ada kalanya dapat dilihat negara lemah dalam konteks *military power* tidak berfikir secara rasional mendeklarasikan perang terhadap negara yang dalam kapabilitas *military power* secara persenjataan lebih kuat. Negara adalah jenis unit politik tertentu yang memiliki dua karakteristik penting: teritorial dan kedaulatan. Teritorial adalah bagian teridentifikasi, kedaulatan adalah mutlak bagi negara untuk mengaturnya (Nye, 2007).

### **2.1.3 Teori Modernisasi**

Modernisasi awalnya mengacu pada kontras dan transisi antara masyarakat agraris 'tradisional' dan jenis masyarakat modern yang didasarkan pada perdagangan dan industri. Sebuah masyarakat modernisasi secara implisit beroperasi atas dasar keyakinan akan masa depan atau lebih tepatnya keyakinan diri dalam menghasilkan kemampuan yang terus berkembang sebagai cara terbaik untuk memecahkan masalah yang muncul. Sama seperti organisasi yang berkembang dapat berkembang tanpa rencana yang komprehensif. Sedangkan arti kata '*modernization*' sendiri menurut *Oxford Dictionaries* adalah: "*The process of adapting something to modern needs or habits, typically by installing modern equipment or adopting modern ideas or method*". Jadi modernisasi adalah penerapan teknologi dan metode-metode baru yang disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan strategis menurut perkembangan zaman, prosesnya tidak dapat dihindari dan akan terus terjadi tanpa bergantung kepada individu maupun pemerintah sekalipun (Charlton & Andras, 2003).

### **2.1.4 Teori Wilayah Pertahanan Pantai**

Wilayah pertahanan pantai merupakan bagian dari penetapan wilayah pertahanan yang ditetapkan untuk memberikan jaminan kepastian terhadap keberadaan wilayah pertahanan di laut (termasuk didalamnya pesisir dan pantai). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Pasal 3 dan 4 menyebutkan tentang, Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut wilayah pertahanan adalah wilayah yang

ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Kemenkumham, 2007).

Wilayah pantai memiliki makna strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem yang ada di darat dan di laut. Kekayaan sumber daya alam tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Banyak berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Secara normatif kekayaan yang dimiliki berupa sumber daya pesisir tersebut dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945).

Daerah Kawasan pesisir sampai saat ini masih sering masyarakat pada umumnya mengartikan suatu kawasan yang sempit dan sangat terbatas. Pantai merupakan perbatasan diantara daratan dan lautan umumnya merupakan suatu garis yang tidak didefinisikan secara jelas pada sebuah peta, hal tersebut terjadi sebagai suatu wilayah transisi bertahap. Sebutan yang diberikan untuk wilayah transisi tersebut biasanya adalah zona pesisir atau daerah pesisir. Pesisir dinyatakan sebagai daerah unik karena disitulah daratan dan lautan bertemu dan tampak nyata, dan bagaimanapun hal tersebut memang merupakan suatu kenyataan yang penting, sesuai dengan (Dokrin Jayamahe, 2018).

Sementara batas laut tidak hanya laut teritorial dalam konteks perbatasan, batas suatu negara sementara itu dapat terdiri atas batas darat, batas laut dan batas udara. Adapun batas wilayah darat dan batas wilayah udara merupakan perbatasan dari batas-batas teritorial yang memiliki dengan kedaulatan penuh (*full sovereignty*), wilayah tersebut terdapat batas yang dimaksud akan tetapi juga mencakup Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), batas Zona Ekonomi Eksklusif (*Economic Exclusive*

Zone) ZEE, dan batas Landas Kontinen (*Continental Shelf*). Batas laut tersebut oleh karenanya untuk batas laut tidak hanya batas teritorial, dalam makna arti maka terminologi yang tepat digunakan untuk laut adalah batas maritim, dimana memuat batas-batas kedaulatan secara penuh dan batas-batas hak untuk berdaulat (*sovereign right*) (Susmoro et al., 2019).

Menurut Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, untuk membangun kekuatan laut atau sea power yang kuat, ada beberapa kondisi yang akan sangat berpengaruh terhadap upaya tersebut, yakni : *Geographical position* atau letak geografis, *Physical conformation* atau sifat fisik, *Extent of territory* atau luas wilayah, *Number of population* atau jumlah penduduk, *Character of the people* atau watak dari penduduk, dan *Character of the government* atau watak pemerintah. Posisi yang sangat strategis dalam hubungan tersebut setiap bangsa berupaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan menggunakan semua instrument-instrumen kekuatan nasional yang dimilikinya. Dengan posisi yang sangat strategis diposisi silang tersebut menjadikan lautan menjadi wilayah perairan yang dilewati oleh jalur utama kapal-kapal laut dari berbagai negara. Sementara itu dalam hubungannya sebagai bangsa yang berdaulat senantiasa selalu diwarnai oleh kompetisi dan kerjasama. Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dalam kaitan kepentingan nasional itulah tentu saja harus senantiasa mengembangkan dan memiliki (*space consciousness*) kesadaran ruang dan (*geographical awareness*) kesadaran geografis (Arto et al., 2020).

#### **2.1.4 Teori Efektifitas**

Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).
- b. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).
- c. Pendapat Arens and Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi untuk mencapai tujuan itu.

Sehubungan dengan yang *Arens* dan *Lortbecke* tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Gibson, dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu :(1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan program;
- b. Keberhasilan sasaran;
- c. Kepuasan terhadap program;
- d. Tingkat input dan output; dan
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Soerjono Soekanto, 1988). Pada efektifitas peneliti menggunakan teori IITCA (*Integrative, Interactive, Transparency, Controlling, Accountability*) yang dikemukakan oleh Prakoso (2016), menyatakan adanya lima faktor penting yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu faktor *Integrative, Interactive, Transparency, Controlling, Accountability*. Maka dapat diperoleh efektifitas yang diinginkan.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dijadikan salah satu acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Pada penelitian terdahulu dapat berguna dalam menganalisa serta untuk mendapatkan informasi tentang efektifitas dan upaya strategi modernisasi Ranpur Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

### **2.2.1 Kebijakan Pengadaan Alutsista Untuk Mendukung Kebutuhan Operasional Tentara Nasional Indonesia**

Menurut Agus Sudarmanto dan HA Sudibyakto (2011) yang membahas tentang Kebijakan Pengadaan alutsista untuk Mendukung Kebutuhan Operasional TNI. Penggunaan strategi pertahanan diperlukan guna terciptanya kelengkapan senjata. Penggunaan strategi pertahanan laut dalam menjaga kepentingan bangsa dan menjamin keamanan bagi pengguna laut. Kepentingan bangsa di laut bukan hanya tentang pertahanan tetapi juga tentang peningkatan modernisasi persenjataan

Pertahanan, bukanlah hal yang menyangkut masalah kelengkapan pasukan, senjata, pertempuran dan perang semata, namun pertahanan nasional dipandang dan harus dimiliki sebuah negara yang berdaulat untuk menciptakan dan menjaga perdamaian (Agus Sudarmanto, 2011).

### **2.2.2 Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik**

Menurut Aldrin Erwinsyah (2011) yang menulis Tesis tentang Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Menurut Erwinsyah Modernisasi militer China adalah bagian dari kekuatan yang terus dikembangkan militer China. Peningkatan persenjataan militer yang digunakan serta sistem pertahanan. Kekuatan militer China ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara menjaga kepentingan nasional, menjaga sumber-sumber energi dan berfungsi sebagai kekuatan regional untuk mencapai tujuan tersebut, China memerlukan strategi militer guna menghadapi kekhawatiran akan persepsi ancaman akan persepsi ancaman. Militer China juga aktif dalam peran Internasionalnya (Erwinsyah, 2011).

### **2.2.3 Dinamika Persenjataan Indonesia dan Malaysia: Studi Tentang Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia Berkaitan dengan Konflik Ambalat (2006-2010)**

Menurut Gita Nadya Herdiani (2012) peneliti menulis tesis tentang Dinamika Persenjataan Indonesia dan Malaysia: Studi Tentang Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia Berkaitan dengan Konflik Ambalat (2006-2010). Mengambil jurusan Fisip Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Jakarta Juni 2012. Penelitian ini di fokuskan peneliti untuk melihat seberapa pengaruhnya untuk mengetahui peningkatan kapabilitas militer Indonesia dimulai dari periode ahun 2006 hingga sampai dengan Tahun 2010. Sehubungan dengan adanya konflik Ambalat. Telah dilakukan oleh penulis dengan melakukan terlebih dahulu

menjelaskan masalah yang membuat faktor Indonesia meningkatkan kapabilitas militernya dan seberapa besar pengaruh dari kapabilitas militer Malaysia dapat mempengaruhi Indonesia serta menganalisa sejauh mana dinamika persenjataan diantara kedua negara tersebut. Melihat seberapa besar kapabilitas militer dari segi kemampuan didalam persenjataan, anggaran pertahanan, dan *manpower* (Herdani, 2012).

#### **2.2.4 Kerjasama Jerman dan Indonesia Dalam Hal Pembelian Senjata Militer Untuk Modernisasi Alutsista TNI**

Menurut Bayu Setya Romansyah (2015) dalam *Journal of Chemical Information and Modeling*. Membahas tentang kerjasama Jerman dan Indonesia dalam hal Pembelian Senjata Militer untuk Modernisasi alutsista TNI. Penelitian ini membahas tentang kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Jerman dalam hal pembelian senjata militer, Indonesia kebijakan pemerintah terkait modernisasi alutsista militer yang tertuang dalam kebijakan kekuatan esensial minimum atau kekuatan esensial minimum (MEF) pada Tahun 2012. Kerja sama berdampak besar pada perubahan kekuatan militer yang dimiliki oleh angkatan bersenjata Republik Indonesia, terutama di atas kekuatan militer dimensi alutsista. Indonesia memilih Jerman sebagai Mitra dalam pembelian senjata militer ini karena Jerman adalah mitra strategis Untuk Indonesia, hal itu bisa dilihat dari berbagai kesepakatan kerja sama yang telah disepakati oleh negara Indonesia dan Jerman (Romansyah, 2015).

#### **2.2.5 Pelaksanaan Kerjasama Yang Dilaksanakan Indonesia-Korea Selatan Dalam Pembangunan Kapal Selam dan Mengevaluasi Kerjasama Indonesia Korea selatan Dalam Pembangunan Kapal Selam Terhadap Ketahanan Alutsista TNI AL**

Menurut Tunggul Prasetyo (2017) dalam Jurnal Ketahanan Nasional, 2017. Penulis membahas tentang kerjasama yang terjalin dengan dilaksanakan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam pembangunan alutsista Kapal Selam kerjasama Indonesia Korea selatan dan

mengevaluasi pembangunan pembangunan kapal selam. Dalam pelaksanaan kerjasama indonesia Korea pembangunan kapal selam memiliki kekurangan berupa kekuatan tawar menawar pemerintahan Indonesia, khususnya KKIP maupun Industri Pertahanan yang terlibat dalam program kerjasama tersebut Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya proses alih teknologi yang masih kurang sebagai salah satu dasar bagi percepatan revitalisasi industri pertahanan dalam mencapai ketahanan alutsista Angkatan Laut (Prasetyo et al.,2017).

#### **2.2.6 Kebijakan Negara Terkait Perkembangan Dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dari Masa ke Masa**

Menurut Endro Tri Susdarwono, Ananda Setiawan, Yomonah Nurul Husna dalam Jurnal Industri Pertahanan (Jurnal USM *Law Review* Vol 3 No 1 Tahun 2020). Yang membahas tentang Kebijakan Negara Terkait Perkembangan Dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dari Masa ke Masa. Mengembangkan industri pertahanan melalui pengadaan alutsista tidak hanya mengembangkan melalui pengadaan persenjataan saja namun juga sehingga mampu mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan tersebut dalam hal ketersediaan suku cadang, pengembangan teknologi dan pembangunan alutsista secara melalui industri pertahanan. Membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut: faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi informasi. (Susdarwono et al., 2020).

#### **2.2.7 Kerjasama Pengembangan *Medium Battle Tank* Harimau Sebagai Perwujudan Ketahanan Alutsista Tentara Nasional Indonesia**

Menurut Febry Triantama (2020) yang menulis Jurnal Ketahanan Nasional Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2020. Dalam penelitian ini penulis melihat sistem internasional

yang anarki memaksa negara-negara di dunia untuk memastikan terkesediaannya kelangsungan hidupnya sendiri. Negara berlomba untuk meningkatkan kapasitas *power* mereka, salah satunya diimplementasikan melalui kemandirian pertahanan. Indonesia sering kali dihadapkan dengan ketergantungan persenjataan sebagai negara yang telah memiliki pengalaman buruk akibat dari alutsista yang diproduksi oleh negara lain serta berupaya mewujudkan ketahanan alutsista tengah gencar melakukan pengembangan industri pertahanan. (Triantama, 2020).

#### **2.2.8 Matrik Penelitian yang Relevan**

Dari penelitian terdahulu yang relevan, peneliti mencoba membuat tabel persamaan dan perbedaan yang berisi deskripsi singkat hasil penelitian sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Agus Sudarmanto dan HA Sudibyakto (2011)	Kebijakan Pengadaan alutsista untuk implementasi mendukung Kebutuhan Operasional TNI	Pertahanan, bukanlah hal yang menyangkut masalah kelengkapan pasukan, senjata, pertempuran dan perang semata, namun pertahanan nasional dipandang dan harus dimiliki sebuah negara yang berdaulat untuk menciptakan dan menjaga perdamaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Strategi pertahanan diperlukan guna terciptanya kelengkapan senjata.</li> <li>• Pengadaan alutsista didasari oleh penguasaan dan peningkatan persenjataan yang ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini membahas tentang Pertahanan dan Persenjataan yang mencakup pembahasan yang luas,</li> <li>• sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengambil lokus yang lebih spesifik yaitu peningkatan Kendaraan Tempur Amfibi.</li> </ul>
2.	Aldrin Erwinsyah (2011)	Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik	Modernisasi militer China adalah bagian dari kekuatan yang terus dikembangkan militer China. Kekuatan militer China ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara menjaga kepentingan nasional, menjaga sumber-sumber energi dan berfungsi sebagai kekuatan regional untuk mencapai tujuan tersebut, dalam peran Internasionalnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Strategi pertahanan laut dalam menjaga kepentingan bangsa dan menjamin keamanan bagi pengguna laut.</li> <li>• Kepentingan bangsa di laut bukan hanya tentang pertahanan tetapi juga tentang peningkatan persenjataan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian tersebut membahas tentang modernisasi</li> <li>• Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan membahas secara khusus tentang yang lebih spesifik yaitu peningkatan Kendaraan Tempur Amfibi.</li> </ul>

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
3.	Gita Nadya Herdian (2012)	Kapabilitas Militer Indonesia dalam peningkatan persenjataan, berkaitan dengan Konflik Ambalat (2006-2010)	Konflik Ambalat pada tahun tersebut berpengaruh pada Kapabilitas militer. Sehubungan dengan adanya hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan faktor-faktor yang membuat Indonesia meningkatkan kapabilitas militernya dan melihat seberapa besar pengaruh dari kapabilitas militer Malaysia dapat mempengaruhi peningkatan Militer Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan persenjataan militer yang digunakan serta sistim pertahanan serta menganalisa sejauh mana dinamika persenjataan diantara kedua negara tersebut.</li> <li>• Melihat kapabilitas militer dari segi alutsista (alat utama sitem senjata), anggaran pertahanan, dan manpower.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada peningkatan kapabilitas militer.</li> <li>• sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengambil masalah peningkatan Kendaran tempur Amfibi.</li> </ul>
4.	Bayu Setya Romansyah (2015)	Kerjasama Jerman dan Indonesia dalam hal Pembelian Senjata Militer untuk	kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Jerman dalam hal pembelian senjata militer, Indonesia kebijakan pemerintah terkait modernisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kebijakan pemerintah terkait modernisasi alutsista militer yang tertuang dalam kebijakan kekuatan esensial minimum.</li> <li>• kekuatan esensial minimum (MEF) guna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terutama di atas kekuatan militer dimensi alutsista. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada modernisasi alutsista</li> <li>• Alutsista yang digunakan dalam pengadaan modernisasi pada penelitian ini yaitu Ranpur Amfibi.</li> </ul>

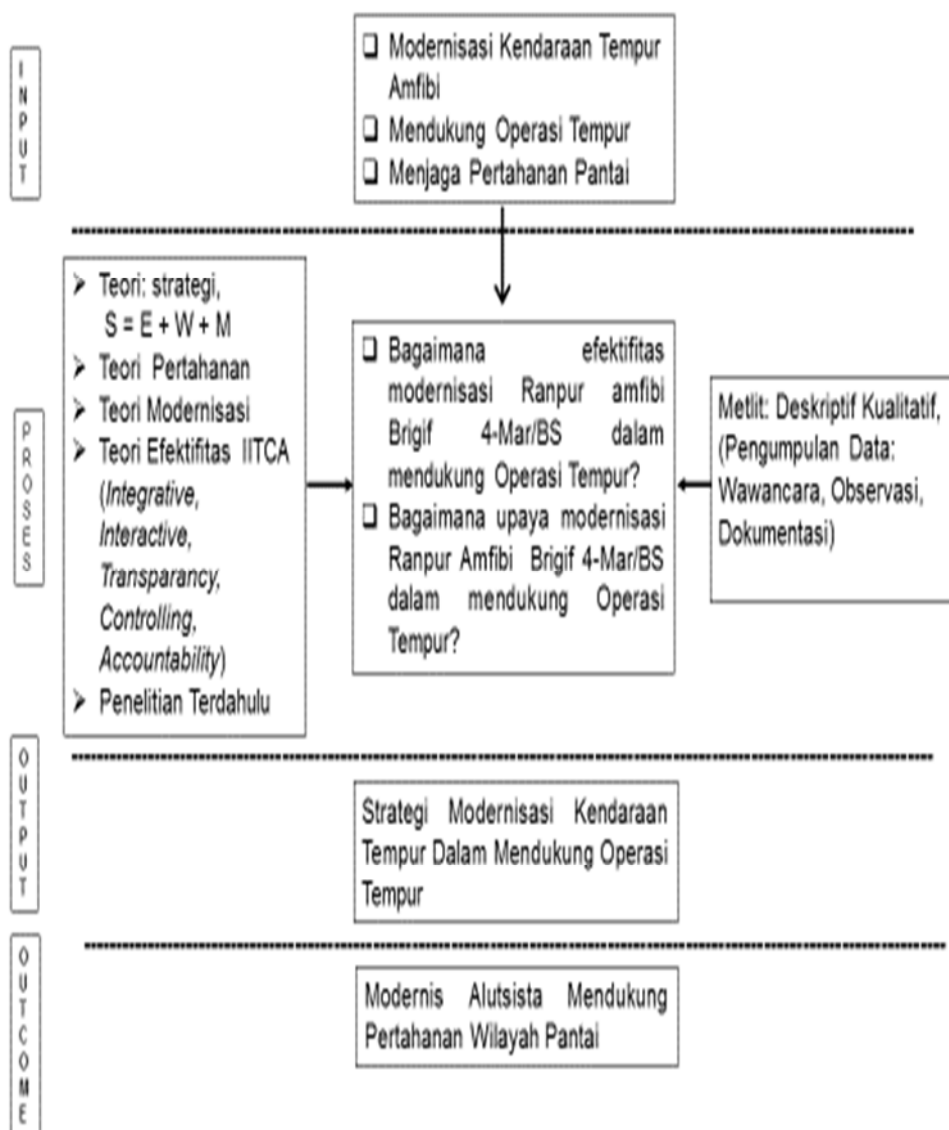
NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Modernisasi alutsista TNI.	alutsista militer yang tertuang dalam kebijakan kekuatan esensial minimum atau kekuatan esensial minimum (MEF) pada Tahun 2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dukung Strategi Pertahan Laut.</li> </ul>	
5.	Tunggul Prasetyo (2017)	Dalam Pembangunan Kapal Selam dan mengevaluasi kerjasama Indonesia Korea selatan dalam pembangunan kapal selam terhadap ketahanan alutsista TNI AL. Kerjasama yang dilaksanakan Indonesia-Korea Selatan	Dalam pelaksanaan kerjasama indonesia Korea pembangunan kapal selam memiliki kekurangan berupa kekuatan tawar menawar pemerintahan Indonesia, khususnya KKIP maupun Industri Pertahanan yang terlibat dalam program kerjasama ketahanan alutsista Angkatan Laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program MEF tidak hanya mengemb angkan alutsista melalui pengadaan alutsista saja namun juga mengembangkan industri pertahanan yang mampu mendukung alutsista tersebut</li> <li>• Dalam hal ketersediaan suku cadang secara mandiri, pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian ini membahas tentang kerjasama modernisasi alutsista pelaksanaan pembangunan Kapal Selam dan mengevaluasi kerjasama Indonesia Korea selatan</li> <li>• Dalam pembangunan kapal selam terhadap ketahanan alutsista TNI AL. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada peningkatan Kendaraan Tempur Amfibi.</li> </ul>

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
				teknologi maupun pembangunan alutsista secara mandiri (UU Industri Pertahanan, (2012).	
6.	Endro Tri Susdarwono, Ananda Setiawan, Yomonah Nurul Husna (2020)	Kebijakan Negara Terkait Perkembangan Dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dari Masa ke Masa	Membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut: faktor geografis negara yang bersangkutan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MEF (<i>Minimum Essential Force</i>) merupakan standar penting dan minimum dari kekuatan yang harus ditetapkan sebagai prasyarat mendasar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini membahas tentang Pertahanan dan Persenjataan yang mencakup pembahasan MEF (<i>Minimum Essential Force</i>). Pada penelitian ini lebih kearah modernisasi alutsista.</li> </ul>
7.	Febry Triantama (2020)	Kerjasama dibidang pertahanan dengan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.	Persenjataan yang diharapkan dapat menjadi penopang dari industri pertahanan tanpa ketergantungan kepada negara lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alutsista yang dimiliki Indonesia pada saat ini memang didominasi oleh alutsista yang sudah akan memasuki usia pensiun serta tertinggal secara teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian ini penelitian membahas tentang Pengembangan Medium Battle Tank Harimau, sedangkan penelitian yang akan dibahas lebih fokus kepada peningkatan Kendaraan Tempur Amfibi.</li> </ul>

Pada penelitian ini sangatlah dimungkinkan untuk dianalisis efektifitas dan upaya strategi modernisasi Ranpur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai. Korps Marinir harus dengan cepat membangun kekuatan tempur, karena kekuatannya berada di terlemah pada saat pendaratan, jika ingin berhasil selama operasi tempur, keberhasilan serangan melalui penggunaan Kendaraan Tempur Tank Amfibi yang lebih berteknologi tinggi maka ada tiga kekuatan Amfibi termasuk diantaranya Kendaraan Tempur didukung oleh kapal serbu berkecepatan tinggi yaitu: *Landing Craft, Air Cushion (LCAC)*, dan *MV-22 Osprey*. Rentang gabungan dan kecepatan *platform* ini akan mencapai kekuatan Tank Amfibi yang fleksibel mampu melakukan serangan Amfibi jenis operasi tempur lainnya.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran menggambarkan tentang alur pikir peneliti dalam memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian serta menjadikan acuan agar terdapat keterkaitan antara latar belakang masalah, tinjauan pustaka sampai dengan pembahasan. Dengan kerangka pemikiran ini akan mempermudah peneliti dalam rangka menyusun hasil penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dan tujuan yang ingin dicapai. Keterangan dan penjelasan dari kerangka pemikiran pada penelitian ini akan diuraikan disertai diagram alir (*flowchart*) seperti pada gambar. Berikut kerangka pemikiran yang digunakan yaitu:



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)